

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2019

Lilis Astutiawaty¹, Carolyn Lukita², Devi Astriani³

Universitas Buana Perjuangan Karawang Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis

E-mail: ak17.lilisastutiawaty@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, carolyn@ubpkarawang.ac.id², devi.astriani@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Penerimaan suatu daerah juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 75 dari 108 sampel dengan teknik pengampilan sampel adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah spss 26. Hasil dari penelitian ini dengan uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi tidak dengan Dana Bagi Hasil yang menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap Belanja Daerah kemudian hasil dari uji simultan menunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

ABSTRACT

The Regional Native Income is one of the sources of regional admissions used to finance the hostage of local governments. the more the Regional Native Income generated by an area then the greater the ability of an area to meet the needs of regional spending. Acceptance of a county is also sourced from the Regional Revenue and Shopping Budget which includes the Proceed Sharing Fund, the General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund. A county can be said to be advanced when the area has high native income of the county. The purpose of the study is to find out the influence of Regional Indigenous Income, Outcome Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Appropriations Fund on Regional Shopping/West Java Provincial City of Budget Year 2016-2019. This type of research is quantitative with a descriptive approach. The sample used was 75 out of 108 samples with sample viewing techniques being purposive sampling. In this study the instrument used was spss 26. Results from this study by partial tests showed that the Local Indigenous Income, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund had positive effects on Regional

Shopping but not with the Outcome Sharing Fund showing no influence on Regional Shopping then results from simultaneous tests showed an influence on Regional Shopping.

Keywords: *Local Original Income, Outcome Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Shopping*

Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia berdampak pada tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, yang mengharuskan pemerintahan segera melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menganut prinsip keterbukaan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur yang diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Sujarweni (2015:231), otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, disamping itu selain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah penerimaan suatu daerah juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD akan semakin berkurang. Secara empiris nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
-------	----------	-----------	---

2016	16.266.951.986.010,00	17.042.895.113.672,00	104,77
2017	17.121.067.343.303,00	18.081.123.739.824,30	105,61
2018	18.817.250.109.020,00	19.642.915.448.763,78	104,39
2019	20.933.819.874.978,00	21.244.266.598.017,66	101,48

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat TA 2016-2019*

**Tabel Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2016	29.493.210.807.883,00	27.621.964.467.242,00	93,66
2017	34.403.683.011.749,00	32.706.749.485.376,69	95,07
2018	35.669.850.990.459,61	33.333.824.961.824,39	93,45
2019	39.111.008.407.298,00	35.838.086.126.516,50	91,62

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat TA 2016-2019*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan terlebih pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah cukup jauh hal ini membuktikan bahwa meskipun setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan namun pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah belum cukup mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan Belanja Daerah.

**Tabel Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun	Dana Bagi Hasil (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)
2016	1.778.216.936.253,00	1.248.112.171.860,00	7.596.342.335.570,00
2017	1.851.522.979.677,00	3.011.001.477.000,00	9.118.920.857.912,00
2018	1.804.540.601.861,00	3.023.552.986.000,00	9.379.906.815.723,00
2019	1.483.785.231.865,00	3.212.647.404.000,00	10.018.939.410.784,00

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat TA 2016-2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2019 Dana Bagi Hasil mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dengan adanya dana transfer dari pemerintahan pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan

Pendapatan Asli Daerah yang didapatnya untuk membiayai belanja daerahnya sendiri. Dalam periode tersebut jumlah Dana Perimbangan khususnya dari komponen Dana Alokasi Khusus merupakan sumber terbesar, Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Tinjauan Pustaka

Teori keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan menurut Jensen dan Mackling (1976) dalam Zelmiyanti (2016) adalah sebuah kontrak diantara dua pihak antara principal dan agen, dimana principal memberi wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan atas nama principal. Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, legislatif dalam hal ini DPRD bertindak sebagai principal sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Kaitan agency theory dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan, dan hubungan antara masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD (principal) dengan pemerintah daerah (agen).

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) huruf a Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, obyek, dan rincian obyek Pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah$$

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DBH = [DBHP + DBHBP]$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak

DBHBP : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Formula Dana Alokasi Umum dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Alokasi DAU per daerah

AD = Alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = Alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Alokasi Khusus dihitung dengan menggunakan rumusan :

$$\text{DAK} = [\text{PU APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}]$$

Keterangan :

DAK : Dana Alokasi Khusus

PU APBD : Penerimaan Umum APBD
(PAD + DAU + DBH)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

Metode analisis data

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19), bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov, menurut Santosa (2013:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significant), jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal, jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Uji multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas dengan Tolerance dan VIF yaitu jika nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi, jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dasar pengambilan keputusan uji asumsi autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Deteksi Autokorelasi Positif:

- Jika $dw > dL$: terdapat autokorelasi positif
- Jika $dw < dU$: tidak terdapat autokorelasi negatif
- Jika $dL < dw < dU$: pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

2. Deteksi Autokorelasi Negatif:

- Jika $(4 - dw) < dL$: terdapat autokorelasi negatif
- Jika $(4 - dw) > dU$: tidak terdapat autokorelasi negatif
- Jika $dL < (4 - dw) < dU$: pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2018). Uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (ABD_RES) yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi, Gujarati, dalam Ghozali (2011).

- a. Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3 + Q_4X_4 + c$$

Keterangan :

Y	=	Belanja Daerah (BD)
X ₁	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X ₂	=	Dana Bagi Hasil (DBH)
X ₃	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
X ₄	=	Dana Alokasi Khusus (DAK)
£	=	Error

Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1.00 (korelasi sempurna).

Uji Hipotesis Hubungan Simultan / Uji F

Menurut Ghozali (2018:97), jika nilai signifikan F < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0,05. Kriteria pengujian hipotesis dalam uji statistik F adalah apabila nilai signifikansi F < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, Ghozali (2018:97).

Uji Hipotesis Hubungan Parsial / Uji t

Menurut Ghozali (2018), menyatakan uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan

berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%, dengan kata lain jika probabilitas $H_a > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas $H_a < 0,05$ maka dinyatakan signifikan.

Pembahasan

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel: Uji Statistik Deskriptif setelah *Outlier*

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PAD	75	Rp 66,385,348,153	Rp 1,293,003,769,037	Rp 446,782,420,945	Rp 256,537,047,200
DBH	75	Rp 49,881,657,705	Rp 188,125,853,117	Rp 84,989,013,413	Rp 29,348,989,244
DAU	75	Rp 368,153,289,000	Rp 1,627,020,432,000	Rp 1,005,967,871,767	Rp 378,158,183,804
DAK	75	Rp 68,183,260,912	Rp 617,131,832,222	Rp 307,753,776,456	Rp 158,988,741,666
BELANJA DAERAH	75	Rp 787,655,736,346	Rp 4,025,755,935,862	Rp 2,414,509,839,849	Rp 901,382,312,671
<i>Valid N (listwise)</i>	75				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui nilai *N* yaitu 75. Artinya data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 75 data, yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2016-2019, maka hasil yang diperoleh dan dapat dijelaskan adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 446,782,420,945 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 256,537,047,200 hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai min Pendapatan Asli Daerah adalah Rp 66,385,348,153 yang dimiliki oleh Kota Pangandaran pada tahun 2016 dan nilai max sebesar Rp 1,293,003,769,037 yang dimiliki oleh Kota Depok pada tahun 2019.
- b. Dana Bagi Hasil pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 84,989,013,413 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 29,348,989,244 hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai min Dana Bagi Hasil adalah Rp 49,881,657,705 yang dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2019 dan nilai max sebesar Rp 188,125,853,117 yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu pada tahun 2019.
- c. Dana Alokasi Umum pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 1,005,967,871,767 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 378,158,183,804 hal ini

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai min Dana Alokasi Umum adalah Rp 368,153,289,000 yang dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2018 dan nilai max sebesar Rp 1,627,020,432,000 yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur pada tahun 2019.

- d. Dana Alokasi Khusus pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 307,753,776,456 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 158,988,741,666 hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai min Dana Alokasi Khusus adalah Rp 68,183,260,912 yang dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2019 dan nilai max sebesar Rp 617,131,832,222 yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur pada tahun 2018.
- e. Belanja Daerah pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp 2,414,509,839,849 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 901,382,312,671 hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai min Belanja Daerah adalah Rp 787,655,736,346 yang dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2017 dan nilai max sebesar Rp 4,025,755,935,862 yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.

Uji Normalitas

Tabel: Uji Normalitas setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		75
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0002128
	<i>Std. Deviation</i>	156913815034,13240000
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,076
	<i>Positive</i>	,076
	<i>Negative</i>	-,043
<i>Test Statistic</i>		,076
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}
<p><i>a. Test distribution is Normal.</i> <i>b. Calculated from data.</i> <i>c. Lilliefors Significance Correction.</i> <i>d. This is a lower bound of the true significance.</i></p>		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Sehingga data tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas karena setelah dikeluarkannya data outlier nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-80765195821,174	64940005161,732		-1,244	,218		
	PAD	,922	,083	,262	11,105	,000	,775	1,290
	DBH	-,612	,797	-,020	-,767	,445	,642	1,556
	DAU	1,968	,107	,826	18,385	,000	,215	4,660
	DAK	,505	,231	,089	2,187	,032	,261	3,825

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut terbebas dari multikolinearitas. Nilai *tolerance* Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,775 > 0,1$, Nilai *tolerance* Dana Bagi Hasil sebesar $0,642 > 0,1$, Nilai *tolerance* Dana Alokasi Umum sebesar $0,215 > 0,1$, Kemudian Nilai *tolerance* Dana Alokasi Khusus sebesar $0,261 > 0,1$. Nilai VIF pada masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu nilai VIF Pendapatan Asli Daerah sebesar $1,290 < 10$, nilai Dana Bagi Hasil sebesar $1,556 < 10$, nilai Dana Alokasi Umum sebesar $4,660 < 10$, dan nilai Dana Alokasi Khusus sebesar $3,825 < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel: Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,985 ^a	,970	,968	161334787489,242	1,701

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *durbin watson* (dw) sebesar 1,701 dimana untuk mencari nilai dU yaitu dengan cara melihat tabel *durbin watson* (dw) $\alpha = 5\%$, diperoleh nilai $k = 4$ dan banyaknya observasi atau $n = 75$, dengan demikian nilai dL yang diperoleh yaitu 1,5151 dan nilai dU yang diperoleh yaitu sebesar 1,7390 maka dapat dikatakan bahwa nilai berdasarkan uji autokorelasi dan tabel *durbin watson* (dw) adalah $dw < dU$ yaitu $1,701 < 1,7390$ dengan demikian tidak terdapat autokorelasi positif, sedangkan hasil dari $(4 - dw) > dU$ yaitu sebesar $(4 - 1,701) > 1,7390$ maka hasil yang diperoleh yaitu $2,299 > 1,7290$ maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil tersebut tidak terdapat autokorelasi negatif, sehingga berdasarkan data tersebut tidak terjadi masalah autokorelasi positif maupun negatif dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9884304291,729	36089566390,863		-,274	,785
	PAD	,012	,046	,033	,269	,788
	DBH	,373	,443	,112	,842	,403
	DAU	,083	,059	,321	1,389	,169
	DAK	,038	,128	,062	,297	,768

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar $0,788 > 0,05$. Nilai signifikan untuk DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar $0,403 > 0,05$. Nilai signifikan untuk DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar $0,169 > 0,05$ dan nilai signifikan untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar $0,768 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel: Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-80765195821,174	64940005161,732		-1,244	,218
	PAD	,922	,083	,262	11,105	,000
	DBH	-,612	,797	-,020	-,767	,445
	DAU	1,968	,107	,826	18,385	,000
	DAK	,505	,231	,089	2,187	,032

a. *Dependent Variable*: BELANJA DAERAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: $Y = (-80765195821,174) + 0,922 X_1 + (-0,612) X_2 + 1,968 X_3 + 0,505 X_4$.

Rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -80765195821,174 ini berarti menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan Dana Alokasi Khusus (X_4) sama dengan nol (*constant*) maka Belanja Daerah(Y) nilainya akan berkurang sebesar -80765195821,174.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki nilai sebesar 0,922 dengan arah hubungannya positif dengan demikian dapat disimpulkan jika mengalami kenaikan satu satuan variabel pendapatan asli daerah dan variabel lain bernilai tetap, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 0,922.
3. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil (X_2) memiliki nilai sebesar -0,612 dengan arah hubungan negatif dengan demikian dapat disimpulkan jika mengalami kenaikan satu satuan variabel dana bagi hasil dan variabel lain bernilai tetap, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar -0,612.
4. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X_3) memiliki nilai sebesar 1,968 dengan arah hubungan positif dengan demikian dapat disimpulkan jika mengalami kenaikan satu satuan variabel dana alokasi umum dan variabel lain bernilai tetap, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1,968.
5. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (X_4) memiliki nilai sebesar 0,505 dengan arah hubungan positif dengan demikian dapat disimpulkan jika mengalami kenaikan satu satuan variabel dana alokasi khusus dan variabel lain bernilai tetap, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 0,505.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,985 ^a	,970	,968	161334787489,24

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,970. Artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 97,0% sedangkan sisanya 0,03% belanja daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel: Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-80765195821,174	64940005161,732		-1,244	,218
PAD	,922	,083	,262	11,105	,000
DBH	-,612	,797	-,020	-,767	,445
DAU	1,968	,107	,826	18,385	,000
DAK	,505	,231	,089	2,187	,032

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan alpha (0,05). Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi pendapatan asli daerah sebesar $0,000 < 0,05$ dan B bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Maka hipotesis pertama terdukung.
2. Hipotesis kedua adalah dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,445 > 0,05$ dan nilai B negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Maka hipotesis kedua tidak terdukung.

3. Hipotesis ketiga adalah dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai B positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Maka hipotesis ketiga tidak terdukung.
4. Hipotesis keempat adalah dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ dan nilai B positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Maka hipotesis keempat tidak terdukung.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel: Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	583022414903432900 0000000,000	4	145755603725858 23000000000,000	559,976	,000 ^b
	Residual	182202395579391180 0000000,000	70	260289136541987 40000000,000		
	Total	601242654461372000 00000000,000	74			

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DBH, DAU

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil uji simultan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₅ terdukung.

Pembahasan Pengaruh X1, X2,X3, dan X4 terhadap Y

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah hal ini menandakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanja daerahnya.

Semakin besar pendapatan asli daerah yang dihasilkan semakin mandiri daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut mampu untuk mandiri. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat. Maka, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aminus (2018) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, yakni kebutuhan untuk memenuhi belanja daerah. Belanja daerah akan ditentukan oleh pendapatan asli daerah, semakin besar pendapatan asli daerah tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan belanja daerah (Jolianis, 2014). Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Napizawati (2020) yang menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah masih belum mampu untuk membiayai kebutuhan belanja daerah, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan asli daerah masih relatif kecil karena masih belum optimalnya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan dana bagi hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika belanja daerah naik maka transfer dana bagi hasil juga naik, sedangkan transfer dana bagi hasil yang diterima terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk membantu menutupi dalam kegiatan belanja daerah. Dana bagi hasil pada kabupaten/kota provinsi jawa barat memiliki kontribusi yang kecil jika dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain, hal tersebut yang menyebabkan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi, Kepramareni, Novitasari (2017) yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah Daerah akan mampu menetapkan Belanja Daerah yang semakin besar jika anggaran Dana Bagi Hasil semakin besar pula, sebaliknya belanja daerah yang ditetapkan akan semakin kecil jika anggaran dana bagi hasil semakin kecil.

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, hal ini menyiratkan bahwa setiap ada peningkatan dana bagi hasil maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana alokasi umum yang didapatkan oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya, semakin kecil dana alokasi umum yang didapatkan oleh suatu daerah maka dapat menurunkan alokasi belanja daerah, sehingga pemerintah daerah kurang dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Karena apabila dana alokasi umum mengalami peningkatan, maka sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal, Abbas, Ratna (2020) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa dana alokasi umum dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan belanja daerah. DAU memiliki fungsi untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensinya (Ferdiansyah, et al., 2018). Dengan adanya DAU dapat menjadikan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana hal tersebut dapat menjadikan pemerintah daerah leluasa dalam menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cornella, Harahap, Karimi (2020) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan besarnya pendapatan asli daerah yang didapat telah mampu untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah tanpa harus bergantung dari dana transfer berupa dana alokasi umum.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016-2019 dana alokasi khusus terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dana transfer lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

DAK adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, karena dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu kegiatan khususnya dalam hal ini merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Rachi, 2015:19). Jika dana alokasi khusus mengalami kenaikan maka hal tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan belanja daerah, hal ini juga membuktikan bahwa dana alokasi khusus dibutuhkan dalam meningkatkan belanja daerah..

Hasil penelitian ini sejalan dengan Lubis (2019) yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki peranan dalam alokasi belanja daerah. Pengalokasian dana alokasi khusus dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Ferdiansyah, Deviyanti, Pattisahusiwa (2018) yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecilnya DAK yang diterima oleh suatu daerah, selain itu kebutuhan sulit diperkirakan dengan alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016-2019. Dari hasil uji R² dapat menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 97,0 % sedangkan sisanya sebesar 0,03 % Belanja Daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) berpengaruh pada Belanja Daerah dengan tingkat korelasi yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah agar semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga alokasi belanja daerah dapat ditingkatkan.

Kepustakaan

- (Aminus, 2018) Aminus, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 9(1).
- (Darmayuda et al., 2015) Darmayuda, M. I., Sujana, S. E. E., & ... (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja *JIMAT (Jurnal ...)*, 1–2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4642>
- (Dewi et al., 2017) Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-BALI (Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 7(1), 180–188.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). dana perimbangan terhadap belanja daerah The influence of local revenue , general allocation funds , special allocation funds , and balancing funds on regional expenditure. 14(1), 44–52.
- (Hasanah, 2020) Hasanah, U. (2020). PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PERIODE TAHUN 2003-2018. 5(1).
- Kementerian Keuangan. 2016. Laporan Realisasi Anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Jakarta.
- _____. 2017. Laporan Realisasi Anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Jakarta.
- _____. 2018. Laporan Realisasi Anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Jakarta.
- _____. 2019. Laporan Realisasi Anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : Jakarta.
- Lubis H, U. 2019. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2143–

2171.

- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 9–18. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3178>
- (Pendapatan et al., 2020)Pendapatan, P., Daerah, A., Umum, D. A., Kabupaten, D., Di, K., & Aceh, P. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi aceh. 5(2), 1–13.
- (Pendapatan et al., 2020)Pendapatan, P., Daerah, A., & Dana, D. A. N. (2020). TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2018 Wiwit Yulia Prestika , Aris Susetyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terha. 2(1), 55–63.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI 2004. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. 2019. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI 2019. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Rosemary, Justine, C., & Barry., B. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38–54.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.